

POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Agus Dedi

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: agusdediide@gmail.com

ABSTRAK

Dalam tataran implementasinya, politik dinasti menjadi sebuah tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Salah satu ciri politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Selain itu harus dijawab pula dengan adanya komitmen yang dibangun oleh seluruh elemen politik. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas, yang mengedepankan aspek kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang terhindar dari praktik nepotisme. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk memecahkan permasalahan tentang politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan masih tetap maraknya keberlangsungan politik dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Idealnya, setiap individu di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi hendaknya memiliki kesempatan yang sama dan berkeadilan untuk menjadi pemimpin sehingga pada dasarnya kita tidak sepakat dengan politik dinasti walaupun di sisi lain ada yang disebut dengan hak konstitusional. Dalam konteks ini, perlu adanya aturan yang tegas untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan.

Kata Kunci: *Politik, Dinasti, Dan Demokrasi.*

ABSTRACT

At the level of implementation, dynastic politics is the biggest challenge in building a valuable democracy in a government order. One of the characteristics of dynastic politics is that it can be seen from the occurrence of a power held by family and kinship groups. The phenomenon of dynastic politics which is very thick with kinship elements has implications for the dynamics of political parties in Indonesia. This phenomenon can be a material for common thoughts, especially the elites and stakeholders by putting forward alternative solutions that refer to the rules. In addition, it must also be answered with a commitment built

by all political elements. In the perspective of democracy, general elections and local elections are one of the answers that will be able to give birth to people's desire to get qualified candidates for leaders, who prioritize aspects of capacity, capability, and integrity that avoid nepotism. This paper uses a descriptive analysis method to solve problems about dynastic politics in the perspective of democracy in Indonesia. The results of the study indicate that the continued prevalence of dynastic politics is a sign that political education in the country is not going well. Ideally, every individual in a country that uses a democratic system should have the same opportunity and justice to become a leader so that basically we do not agree with dynastic politics even though on the other hand there are what are called constitutional rights. In this context, it is necessary to have strict rules to regulate the limitation of power and term of office.

Keywords: Politics, Dynasties, and Democracy.

PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum yang merupakan salah satu praktek dalam demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya perwakilan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sejak pemilihan umum pertama sampai dengan pemilihan umum tahun 2019, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi sebanyak tigabelas kali. Kegiatan pesta demokrasi ini pada intinya adalah untuk mencari pemimpin, baik yang akan menduduki kursi di legislatif maupun di eksekutif. Keterpilihan mereka akan sangat bermakna bagi pembangunan sistem pemerintahan yang berkeadilan jika mampu mewujudkan perubahan-perubahan bagi pembentukan pemerintahan yang baik. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bentuk negara kesatuan yang tertulis secara eksplisit dalam dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Di mana bahwa penempatan jabatan strategis di pemerintahan merupakan yang jabatan politik dilakukan melalui mekanisme pemilihan sehingga jabatan seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, merupakan jabatan-jabatan politik. Perihal pengisian jabatan ini merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akan tetapi dalam implementasinya pemilihan-pemilihan jabatan politik tersebut pada zaman orde baru dilakukan melalui perwakilan, seperti DPR RI memilih presiden, DPRD Provinsi memilih gubernur, DPRD Kabupaten/kota memilih bupati dan wali kota. Dengan menggunakan sistem seperti ini mengakibatkan terjadinya pemufakatan-pemufakatan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang berdaulat di negara yang menganut sistem demokrasi.

Pakar politik ternama, Abraham Lincoln memberikan gambaran penting tentang hakikat sebuah demokrasi yang pada hakikatnya merupakan sebuah pemerintahan yang mengedepankan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa konsep demokrasi menurutnya adalah pemerintahan yang terbangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, dibentuk melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Pemilu dan pilkada hanya dijadikan alat untuk memperkuat legitimasi terhadap kekuasaan sehingga dapat dimaknai bahwa proses pemilihan umum pada masa orde baru tidak berjalan sesuai aturan sehingga makna demokrasi yang sesungguhnya tidak terwujud, mencederai nilai-nilai luhur azas demokrasi. Permasalahan pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia pada masa orde baru sampai saat ini tidak jauh berbeda kondisinya. Pada masa orde baru, pemilihan untuk jabatan eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh anggota legislatif, kondisi saat ini pasca reformasi pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Jimmly Asshiddiqie (2009: 418) ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu yang pada intinya memberikan gambaran tentang hal-hal sebagai berikut: Mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, pergantian

pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan juga melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pendapat Schumpeter (Parma, 2001; 211) menjelaskan bahwa peranan pemilihan umum adalah “ untuk menghasilkan suatu pemerintahan atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif nasional atau pemerintah “

Pada dasarnya diselenggarakannya pemilu dan pilkada sebagai upaya untuk orang-orang terbaik yang diusung oleh partai politik maupun jalur perorangan dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat.

Pemilu dan pilkada idealnya terhindar dari praktik politik dinasti yang lebih mengedepankan kekeluargaan, kekerabatan, persekongkolan kelompok yang akan menutup ruang gerak bagi kader partai untuk turut serta berkompetisi dalam kontestasi politik. Fenomena politik dinasti ini dipandang sebagai ketidakberhasilan pendidikan politik dalam melahirkan kader-kader dari internal partai untuk mampu memimpin di berbagai tingkatan dari pusat sampai ke tingkat daerah.

Citra Politik dinasti dipandang memiliki konotasi negatif dalam

penyelenggaraan sebuah tatanan pemerintahan karena berkaitan dengan penyimpangan kekuasaan yang berakibat pada terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti juga merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dan seringkali menjadi perdebatan publik di tengah masyarakat. Fenomena ini terkesan membatasi hak politik seseorang untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan akan membuat masyarakat menjadi apatis dan cenderung alergi untuk menentukan sikap politik dalam hal memilih pemimpin kredibel yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pemerintahan. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk memaparkan sebuah kajian tentang “Bagaimana dinasti politik dilihat dari perspektif demokrasi di Indonesia?”

KAJIAN PUSTAKA

1. Politik Dinasti

Dalam perspektif politik tanah air dapat dinyatakan bahwa politik dinasti menjadi tantangan bagi semua elemen politik karena berimplikasi pada terciptanya pemerintahan yang kurang berkualitas. Hal ini terjadi karena citra politik dinasti sangat kuat mengarah pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang kurang baik, seperti mengedepankan

kepentingan keluarga sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan demi tercapainya keuntungan pribadi atau golongan. Querubin (2010:2) menjelaskan pandangannya tentang politik dinasti pada intinya mengarah pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal lebih dari satu generasi. Artinya, politik dinasti ini akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya agar tidak lepas dari lingkungan keluarga atau kerabatnya.

Sebagai istilah yang saat ini populer tentang politik dinasti ada upaya seorang pemimpin berdasarkan hasil pemilihan umum mulai dari tingkat pusat dan daerah yang sedang menduduki jabatan atau yang tengah berkuasa untuk memposisikan anggota keluarganya dan kerabatnya untuk dijadikan pengganti atau sebagai penerus tampuk kekuasaan dan menjadi pemimpin periode berikutnya dan menempatkan kerabat keluarganya dalam posisi strategis dalam pemerintahan. Ini menandakan bahwa politik dinasti berdampak kurang baik pada sistem pemerintahan saat ini karena lebih mengedepankan regenerasi kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan yang didasarkan pada hubungan

kekeluargaan, golongan, dan kekerabatan.

Pandangan lain dikemukakan pula oleh Mosca (Heryanto, 2019: 210), munculnya dinasti politik karena tindakan elite-elite politik cenderung mewariskan posisi kekuasaan politiknya kepada generasi penerusnya atau di bawahnya. Proses pewarisan kekuasaan politik ini terjadi oleh posisi politik yang terbuka. Pada konteks lainnya Stephen Hess dalam Heryanto (2019: 210) menjelaskan bahwa dinasti politik dapat terus berkembang atau terhenti tergantung dari tindakan generasi penerusnya. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan politik keluarga.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa politik dinasti yang ada di Indonesia memberikan gambaran bahwa dengan membawa nama besar tokoh keluarga, jaringan politik yang telah dibangun anggota dinasti politik menunjukan kontestasi politik di dalam tubuh keluarga sebagai bukti nyata bahwa keluarganya memiliki kekuatan dan kemampuan berpolitik di negerinya sendiri.

2. Demokrasi

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa pendapat pakar politik yang mengemukakan konsep tentang demokrasi. Beberapa pakar tersebut di antaranya Hertz dalam Sukarna (1979:37) yang menjelaskan bahwa demokrasi merupakan terbentuknya suatu sistem pemerintahan di mana tidak ada seorang anggota masyarakat atau kelompokpun yang mempunyai hak prerogatif politik (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga atas orang lain). Pendapat lain tentang konsep demokrasi dikembangkan oleh Lincoln dalam Gaffar (2005 : 3) bahwa secara normatif demokrasi merupakan suatu cara yang hendak diselenggarakan oleh sebuah negara. Dengan memperhatikan beberapa pendapat para pakar politik tentang konsep demokrasi di atas baik yang menjelaskan secara etimologis maupun konsep secara umum kiranya dapat dinyatakan bahwa demokrasi dimaknai bahwa pemerintahan terbentuk karena pengejawantahan dari seluruh rakyat.

Dengan melihat dari kata demokrasi tersebut kiranya dapat pula jika kita persepsikan bahwa sistem demokrasi dalam sebuah pemerintahan merupakan simbol kedaulatan rakyat. Namun demikian walaupun tampak sederhana jika dilihat dari arti

katanya, sampai saat ini ternyata sukar menunjukkan definisi yang dapat diterima oleh semua kalangan karena tumbuh dan berkembangnya demokrasi sesuai dengan dinamika politik dalam suatu negara.

Dalam pandangan para pakar politik demokrasi disebutkan juga mempunyai dua macam pengertian. Adapun istilah yang dipakai adalah demokrasi sebagai ideologi atau pandangan hidup atau teori dan demokrasi sebagai *actual governmental mechanism* atau *democracy in action* atau demokrasi praktek.

Dalam pengertian demokrasi di atas, yang pertama memberikan gambaran tentang hal yang fundamental. Pada tergambaran banyak persamaan daripada perbedaannya. Perbedaan yang fundamental dalam pelaksanaan demokrasi pada berbagai negara terletak pada demokrasi yang pertama.

Pakar lain yaitu Feith (1962:2) menjelaskan tentang karakteristik demokrasi konstitusi bahwa konsep atau pemahaman tentang demokrasi dalam penyelenggaraan suatu negara adalah adanya suatu perwakilan rakyat (*legislative*) yang dibentuk berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia atau cara lain. Selain itu mengharuskan adanya organisasi partai politik, adanya lembaga yang mempunyai

tugas melaksanakan undang-undang (*executive*) dan garus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya untuk mengatur ketertiban penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya lembaga yang bertugas menegakan tata tertib pelaksanaan kekuasaan negara (lembaga yudikatif).

METODE

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang implementasi politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. Whitney (1960:160) pada intinya memberikan pandangan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam konteks metodologi penelitian ini dapat dimaknai bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian berupa pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dari gejala yang diamati atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Fenomena yang diteliti yaitu politik dinasti dalam

perspektif demokrasi di Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme untuk memilih para pemimpin dan sekaligus merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga terbentuk perwakilan pemerintahan yang memiliki legalitas formal sesuai dengan konstitusi.

Pemilihan umum juga sering disebut sebagai pesta demokrasi yaitu untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pergantian pemimpin melalui mekanisme pemilihan dimungkinkan terjadinya persaingan yang ketat bagi calon-calon yang berkeinginan menduduki jabatan politis atau struktural dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, para calon pasti akan menyusun strategi untuk mencari dukungan dari masyarakat yang mempunyai hak suara. Selanjutnya dapat dijelaskan pada bagian ini bahwadalam implementasinya terdapat satu alternatif strategi yang sering dilakukan oleh para calon untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan melalui

strategi yang mengabaikan etika berpolitik, yaitu dengan cara memberi uang kepada masyarakat agar memilih dirinya. Selain praktik seperti itu, hal yang sering tampak dalam dinamika politik Indonesia adalah Politik Dinasti yang berorientasi pada kekuasaan yang bersifat turun temurun dan kekerabatan. Idealnya fenomena seperti itu harus dihindari dan tidak dilakukan karena semakin tumbuhnya praktik politik dinasti yang mengedepankan unsur kekeluargaan atau kekerabatan maka proses rekrutmen dan pergantian kepemimpinan di tubuh partai politik tidak berjalan atau stagnan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi partai pembentukan politik tanah air.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui pengamatan fenomena sosial dan politik diperoleh gambaran nyata bahwa penyebab terjadinya politik dinasti adalah sebagai berikut:

1. Upaya mempertahankan kelanggegan kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai cara dan strategi yang dilakukan oleh petahana agar kekuasaan tetap berada di tangan dirinya dan keluarganya.
2. Upaya menutupi kelemahan kepemimpinan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelompok terorganisir dengan hasil permufakatan bersama dalam tubuh kelompok untuk membentuk pengganti kepemimpinan. Upaya

ini dilakukan agar kepemimpinan tetap ada dalam tangan anggota keluarganya sehingga kelemahan-kelemahan saat ia memimpin tidak diangkat ke permukaan sehingga publik tidak mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukannya.

3. Upaya membangun kekuatan politik. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya upaya penempatan jabatan-jabatan strategis jatuh pada keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Jika ini berhasil dilakukan maka akan terbangun kekuatan politik yang menguntungkan dirinya.
4. Upaya membangun keuntungan pribadi dan keluarga. Hal ini ditunjukkan melalui strategi yang menguntungkan anggota keluarganya melalui posisi jabatan strategis yang dimilikinya maka keuntungan pribadi dan keluarga secara otomatis terwujud sesuai harapan dirinya.
5. Upaya menutup peluang pihak lain menduduki kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya yang sistematis membuat persekongkolan politik yang menutup peluang orang lain di luar kekerabatan masuk pada lingkaran kekuasaan politik.

Mencermati beberapa penyebab terjadinya politik dinasti di Indonesia yang semakin marak ini dapat dinyatakan bahwa negara akan sulit menemukan pemimpin yang memiliki

kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik untuk memajukan tatanan pemerintahan dari berbagai tingkatan mulai pusat sampai daerah. Dengan sistem politik dinasti, sistem pengkaderan di dalam tubuh partai politik tidak berkembang dengan baik. Artinya, kader-kader yang ada di dalam partai politik tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk turut serta berkompetisi menjadi pemimpin bangsa. Politik dinasti membatasi ruang gerak bagi kader partai dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran dan aktualisasi kepemimpinannya untuk memperoleh kursi kekuasaan.

Sebagai penutup pembahasan Saya berpandangan bahwa dengan maraknya politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik hanya dijadikan alat kendaraan politik yang pada akan menyumbat fungsi ideal partai karena partai politik hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. Dengan cara-cara seperti ini, rekrutmen kader partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat hanya dari aspek popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Konteks lainnya ada juga ditunjukkan dengan sisi lain muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Hal ini menunjukkan kaderisasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan partai. Ini memberikan konsekuensi menutup

ruang dan peluang masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bisa mencalonkan diri untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh kekuasaan. Jangan sampai terjadi pusaran kekuasaan berada di lingkungan elite politik yang mengedepankan kekerabatan atau keluarga. Ini akan berpotensi memunculkan terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Jika ini terjadi maka mewujudkan pemerintahan yang bersih akan semakin jauh dari cita-cita bersama dan tidak dapat mewujudkan sistem demokrasi yang sehat.

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa dengan masih tetap maraknya keberlangsungan politik dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Idealnya, kesempatan setiap warga masyarakat dalam menduduki jabatan itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan kriteria, sehingga peluang yang terbuka ini memberikan hak yang sama kepada warga negara. Artinya, jabatan itu dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang yang memiliki kekeluargaan, kekerabatan ataupun kedekatan secara emosional. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang mengatur pembatasan periodisasi agar politik dinasti tidak bertumbuh dengan cepat karena merusak atanan sistem demokrasi.

Politik dinasti dapat dihindarkan apabila masyarakatnya telah memahami politik secara baik.

Banyak yang harus dilakukan akan tetapi perlu adanya kesadaran dari partai-partai politik dari mana mereka berasal bisa menduduki kursi di legislatif yang kemudian diberi kewenangan untuk membuat undang-undang dan bisa memasukan dalam pasal-pasal agar politik dinasti tidak terus berkembang.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dalam penelitian ini, berikut simpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Politik dinasti merupakan fenomena yang masih terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah agenda besar yang harus diubah agar etika dalam berpolitik betul-betul tampak dalam perspektif demokrasi. Karakteristik politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang pada gilirannya akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena partai politik hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. Dengan cara-cara seperti ini, rekrutmen kader partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat hanya dari aspek popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Ini memberikan

konsekueansi menutup ruang dan peluang bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk dapat mencalonkan diri dan berkesempatan ikut berkompetisi memperoleh kekuasaan. Jika politik dinasti tetap tumbuh dalam lingkunagn pemerintahan di Indonesia maka akan sukar mencapai harapan mewujudkan cita-cita luhur sistem karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Graffindo.

Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca NY : Cornell University Press.

Gaffar, Afan. 2005. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi; Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Heryanto, Gun-Gun. 2019. Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: IRCiSoD.

Sukarna. 1979. Sistem Politik. Bandung : Alumni.

Querubin, P, 2010. Family and Politics : Dynastic Incubency Advantage in the Philippines, Uapublished Manuscript

Varma, SP. 2001. Teori Politik Modern, Jakarta; PT Rajagrafindo

Whitney, F.L .1960. *The Element of Research*. Asian Ed, Overseas Book Osaka

Undang-Undang Dasar 1945

Biodata Penulis

Dr. H.Agus Dedi, M.Si adalah dosen LL DIKTI Wilayah IV Jabar Banten, dpk pada Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unigal Ciamis.